indonesiana by TEMPO
Cari berita
Mulai Menulis

**Rachmad Rofik**
Penulis Indonesiana

Saya adalah penulis independen yang tertarik pada isu ekonomi, kebijakan publik, dan dinamika regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan latar belakang di bidang teknologi dan ekonomi digital, saya berupaya membaca kebijakan tidak hanya dari teks, tetapi juga dari implikasinya di lapangan. Melalui tulisan, saya mendorong diskursus yang rasional, berbasis data, dan seimbang. Kritik disampaikan secara konstruktif, dengan tujuan membuka ruang dialog dan memperkuat pemahaman publik terhadap persoalan ekonomi dan tata kelola. Bagi saya, menulis adalah cara sederhana untuk menjaga kewarasan publik--tenang, tertib, tapi tetap berpikir ke depan. | Rachmadrofik.github.io | Wxj.my.id

# Skandal Kuota Hangus: Saatnya MK Mengakhiri "Perampokan" Hak Konsumen 613T

Belajar dari global, Indonesia Tertinggal Jauh dari Afrika Selatan

Sabtu, 17 Januari 2026 08:23 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 5

Tutup Iklan X

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

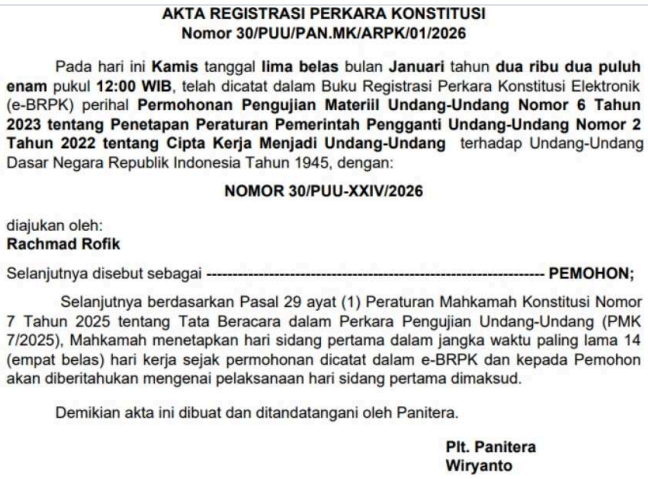

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI**
**Nomor 30/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh enam** pukul **12:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

**NOMOR 30/PUU-XXIV/2026**

diajukan oleh:
**Rachmad Rofik**

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Plt. Panitera**
**Wiryanto**

*Tangkapan layar judicial review, nomor perkara 30/PUU-XXIV/2026*

---

## Skandal Kuota Hangus: Saatnya MK Mengakhiri "Perampokan" Hak Konsumen Senilai Rp 63 Triliun

Di tengah gegap gempita transformasi digital, terselip sebuah praktik bisnis yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Setiap tahun, uang rakyat Indonesia sebesar **Rp 63 triliun** menguap begitu saja. Bukan karena konsumsi yang nyata, melainkan akibat skema "kuota hangus" yang diterapkan operator seluler.

Data mengejutkan dari *Indonesian Audit Watch* (IAW) menyebutkan bahwa dalam 15 tahun terakhir, akumulasi kerugian konsumen mencapai angka luar biasa: **Rp 613 triliun**. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan "pajak siluman" yang dipungut korporasi dari saku mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga pelaku UMKM di pelosok negeri.

## Estafet Perlawanan: Dari Didi Supandi hingga Rachmad Rofik

Praktik menghanguskan kuota internet yang sudah dibayar lunas adalah pelanggaran hak milik yang nyata. Inilah yang mendasari munculnya gelombang gugatan warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

yang selama ini dianggap sebagai "norma" industri. Mereka berargumen bahwa ketika rakyat membeli kuota, terjadi peralihan hak milik sesuai Pasal 1457 KUHPerdata.

Api perjuangan ini kini diteruskan secara lebih spesifik oleh **Rachmad Rofik melalui Perkara Nomor 30/PUU-XXIV/2026**. Gugatan ini berpijak pada **Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945**, yang dengan tegas melindungi hak milik pribadi dari pengambilan sepihak secara sewenang-wenang. Logika industri yang menyamakan kuota dengan tiket transportasi atau makanan basi adalah sesat pikir. Kuota adalah aset digital; ia tidak busuk dan tidak memiliki *opportunity cost* ruang seperti kursi pesawat.

**Menelanjangi Mitos "Kendala Teknis"**

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) selalu berlindung di balik tameng "keterbatasan spektrum". Namun, **Iskandar Sitorus dari IAW** membongkar logika cacat ini dengan perbandingan sederhana: *"Token listrik, e-money, dan saldo e-wallet juga berbasis frekuensi dan sistem digital, tapi saldonya tidak pernah hangus. Mengapa kuota internet diperlakukan berbeda?"*

Bahkan, belakangan ini operator seluler mulai menjual produk "anti-hangus". Secara hukum, ini disebut **Asas Estoppel**—pengakuan secara tidak langsung dari operator bahwa kuota sebenarnya memang tidak perlu hangus. Jika sekarang mereka bisa menyediakan layanan tersebut, maka alasan "kendala teknis" selama 15 tahun terakhir hanyalah fiksi untuk melegitimasi keuntungan tanpa biaya produksi (*unearned income*).

**Belajar dari Global: Indonesia Tertinggal Jauh**

Di saat regulator kita tampak "rabun" terhadap kerugian rakyat, negara-negara lain sudah bergerak maju melindungi hak milik digital konsumennya melalui mekanisme *Data Rollover*:

indonesiana by TEMPO
Mulai Menulis

*Lengkap:* https://www.vodafone.de/privat/mobilfunk/gigadepot.html

2. **Afrika Selatan (Regulasi ICASA):**
   Regulator telekomunikasi Afrika Selatan (ICASA) mengeluarkan peraturan *End-User and Subscriber Service Charter* yang mewajibkan semua operator untuk mengizinkan konsumen melakukan akumulasi (*rollover*) sisa data sebelum masa berlaku berakhir.
   - *Link*
     *Lengkap:* https://www.icasa.org.za/news/2019/icasa-confirms-implementation-of-the-end-user-and-subscriber-service-charter-regulations
3. **India (Transparansi TRAI):**
   Regulator India (TRAI) mendorong persaingan yang sehat sehingga fitur *data rollover* menjadi standar layanan bagi operator besar seperti Airtel demi melindungi nilai ekonomi dari kuota yang sudah dibayar rakyat.
   - *Link*
     *Lengkap:* https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Information_Note_03042018.p
4. **Kolombia (Internet sebagai Layanan Esensial):**
   Melalui UU No. 2108 Tahun 2021, Kolombia melindungi hak konsumen atas data yang telah mereka beli sebagai bagian dari hak akses layanan publik esensial.
   - *Link*
     *Lengkap:* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=167231

## Kesimpulan: Negara Jangan Menjadi Fasilitator "Fraud"

Pembiaran yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo selama belasan tahun dapat dikategorikan sebagai *fraud by omission*—kecurangan yang terjadi karena otoritas mendiamkan praktik yang merugikan publik. Rp 63 triliun per tahun adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah ketidakadilan.

Kita menuntut:

1. **Mahkamah Konstitusi** untuk berani memutus bahwa sistem kuota hangus adalah inkonstitusional.
2. **Pemerintah** untuk segera menerbitkan regulasi **Data Rollover Nasional** tanpa syarat yang menjebak.
3. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** untuk melakukan audit investigatif terhadap "pendapatan hangus" operator seluler sejak tahun 2010.

bersuara: **Hapus kuota hangus sekarang juga, karena keadilan tidak boleh ada masa kadaluwarsanya!**

#mahkamah-konstitusi

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 5

**Rachmad Rofik**
Penulis Indonesiana

**11 Pengikut**

+ Ikuti Penulis

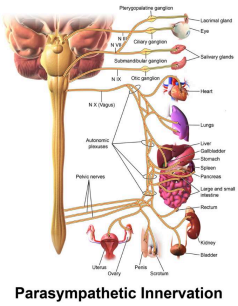


## Zikir Napas dan Koherensi Jantung

1 hari lalu

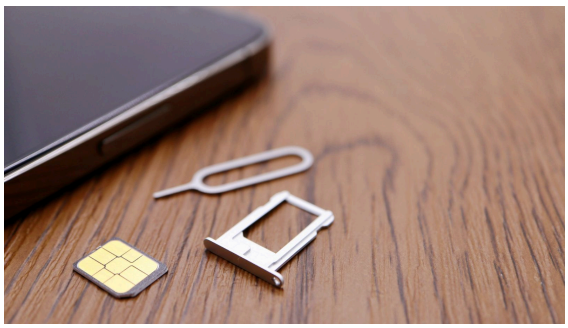

## Bongkar Muslihat Kuota Hangus: 80 Halaman Perlawanan Rachmad Rofik di MKRI

Senin, 9 Februari 2026 17:43 WIB

Lihat Semua Artikel

## Baca Juga

Penulis Indonesiana - Senin, 9 Februari 2026 17:43 WIB

Aksi korporasi Telkomsel pasca-gugatan MK bukan sekadar inovasi, melainkan taktik bertahan. Rakyat jangan mau dijinakkan oleh 'keadilan eceran' ...

0

**Rachmad Rofik**
Penulis Indonesiana

## Saat Pakar Mulai Pasang Badan dan Operator "Luluhnya"

Penulis Indonesiana - Minggu, 8 Februari 2026 14:24 WIB

Membongkar paradoks kuota hangus melalui kacamata konstitusi. Saat pakar bicara pilihan bisnis, saya bicara hak milik rakyat....

0

**Rachmad Rofik**
Penulis Indonesiana

## Tok! MK Registrasi Gugatan Kuota Hangus Jadi Perkara

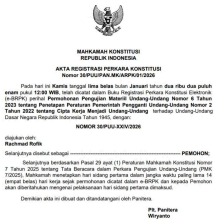

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 38/PUU/PAN.MK/APK/01/2026

Penulis Indonesiana - Kamis, 15 Januari 2026 16:33 WIB

Kuota internet yang telah dibayar lunas oleh konsumen adalah hak milik pribadi. ...

5

**Rachmad Rofik**
Penulis Indonesiana

## Menggugat Logika Kuota Hangus: Catatan Perkara

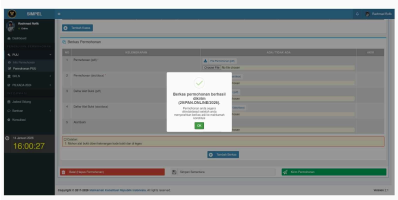

Penulis Indonesiana - Kamis, 15 Januari 2026 08:19 WIB

Objek gugatan saya adalah Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Ciptaker). Pasal ini seolah memberikan "cek kosong" bagi operator seluler...

Penulis Indonesiana

## Erwin Hariadi Simamora, S.H : Kekuatan Mengikat dalam

Penulis Indonesiana - Rabu, 9 September 2020 14:36 WIB

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...

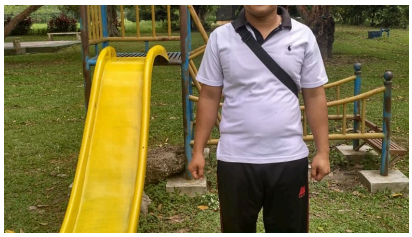

0

**Redaksi**
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

## Perpanjangan Masa Jabatan Hakim/Pimpinan MK adalah

Penulis Indonesiana - Jumat, 4 September 2020 12:50 WIB

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dalam rapat Paripurna DPR RI (1/9-2020) terkait status hukum masa jabatan ha...

0

**Dian Basuki**
Penulis Indonesiana

## Menanti Ketukan Palu Hakim MK

Penulis Indonesiana - Rabu, 26 Juni 2019 14:22 WIB

Rakyat menunggu keputusan para hakim MK yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan nurani yang bersih. Apakah para hakim men...

0

**Dian Basuki**
Penulis Indonesiana

## Foto, Gestur, dan Relasi Kuasa

disalahpahami...

0

## Artikel Terpopuler

**Muhamad Jaesa**
Engineer Energi Terbarukan

Berita Pilihan

### Tenaga Surya Seharusnya Jadi Masa Depan Energi Indonesia

Engineer Energi Terbarukan - 3 hari lalu

Energi surya mampu menyuplai lebih kebutuhan listrik nasional. Sayang belum dikembangkan secara optimal dan kapasitas terpasang baru 1 persen...

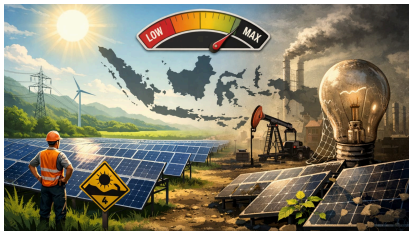


0

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA UMS**
Penulis Indonesiana

### UMS Borong ITAY 2026, Tegaskan Transformasi dan

Penulis Indonesiana - 6 jam lalu

UMS raih dua ITAY 2026 untuk kinerja kampus dan kepemimpinan rektor, perkuat posisi sebagai universitas Islam berkelas dunia...

0

**Adrianus Safarin**
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

### Dari A sampai Z Kekacauan Program Makanan Bergizi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Kekacauan program MBG karena kepemimpinan yang tak kompeten, praktik koncoisme dan nepotisme, serta orientasi politik jangka pendek...

**Desha Setiardi, MBA**
Penulis Indonesiana

## Bisnis di Era Disrupsi: antara Ketahanan, Inovasi, dan

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Dalam konteks Indonesia, karakteristik pasar domestik, struktur ekonomi beragam, serta kesiapan digital yang tidak merata perlu jadi perhatian...

1

**Ramdansyah Ramdansyah**
Penulis Indonesiana

## Habitus, Doxa, dan Kontroversi Ijazah

Penulis Indonesiana - Selasa, 17 Februari 2026 18:18 WIB

Derau dugaan ijazah palsu Presiden RI ke 7 akan terus eksis di ruang publik selama Ramadhan 2026 karena Habitus Roy Suryo ...

0

**Gunoto Saparie**
Penulis Indonesiana

## Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Komunitas

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Selama ini kebijakan kebudayaan sering bergerak dari atas ke bawah, sementara kebudayaan sendiri tumbuh dari bawah ke atas....

0

**Heri Mirhan**
Penulis Indonesiana

## Perbedaan Awal Puasa Ikhtilaf Pembawa Rahmat

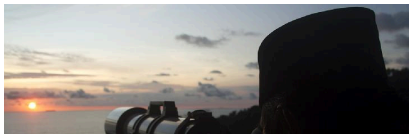

0

**Atfal Nuril Abdul Ghani**
Penulis Indonesiana

## Urgensi Pengaturan Debt Collector sebagai Upaya

Penulis Indonesiana - 8 jam lalu

Regulasi debt collector mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, dan tanggung jawab negara dalam praktik penagihan utang....

0

**Wahyu Triono KS**
Ahli dan Praktisi Kebijakan Publik

Berita Pilihan

## Oposisi dalam Demokrasi

Ahli dan Praktisi Kebijakan Publik - 2 hari lalu

Saat oposisi bersuara, demokrasi bernapas, ia cermin bangsa, menegur kuasa, menyalakan harapan republik adil, beradab, bermartabat....

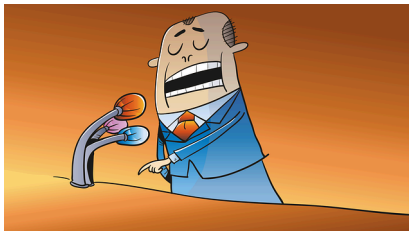

0

**Indrato Sumantoro**
Pemerhati Aspal Buton

## The Buton Effect: Dari Buton Untuk Dunia (Bab 3)

Pemerhati Aspal Buton - 3 hari lalu

The Buton Effect menantang para pemimpin untuk memilih keberanian atau kenyamanan. ...

1

Menguji Politik Bebas Aktif di Tengah Pusaran Gaza

6 jam lalu

Implementasi Sistem Merit Diperkuat, LAN RI Gelar Uji Kompetensi

6 jam lalu

Kegagapan Bahasa dan Kelahiran Makna

7 jam lalu

Tubuh Basah, Tawa Pecah: Ritual Perang Air di Hari Puncak

6 jam lalu

Lihat semua

## Terkini di Peristiwa

Implementasi Sistem Merit Diperkuat, LAN RI Gelar Uji Kompetensi

6 jam lalu

Disperpusip Jatim Kembangkan Ruang Baca yang Inklusif

8 jam lalu

Menata Langkah dan Menjaga Konsistensi Organisasi Gebyuran

1 hari lalu

Penguatan Organisasi Jadi Kunci Konsistensi Gebyuran Bustaman

1 hari lalu

Michael Dorong Gebyuran Bustaman Tak Hanya Jadi

1 hari lalu

Kembangkan Ruang Baca yang Inklusif

8 jam lalu

LAN RI Dorong Integrasi Pelatihan dan Kebijakan ASN

3 hari lalu

Akselerasi Produk, Rumah BUMN Pekalongan Lakukan

4 hari lalu

Menata Langkah dan Menjaga Konsistensi Organisasi Gebyuran

1 hari lalu

Michael Dorong Gebyuran Bustaman Tak Hanya Jadi

1 hari lalu

Lihat semua

## Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

## Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

**Sosial Media**

**Download Aplikasi Tempo**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play